

# PENGEMBANGAN USAHA ANEKA KERIPIK MELALUI ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI KECAMATAN KENDAL KABUPATEAN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

**Endang Murti<sup>1</sup> dan Zulin Nurchayati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun

<sup>2</sup>Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun

Email : [endangmurti@unmer-madiun.ac.id](mailto:endangmurti@unmer-madiun.ac.id)

***Abstract.** Business Group Aneka Keripik Durian Karanggupito Village and Business Group Aneka Keripik Mawar Karangrejo Village, Kendal Kabupaten District Ngawi East Java Province. Production aspect of various chips produced need quality improvement, thickness, less crisp, less tasting seasoning, dull label less attractive, product produced not durable food. It is necessary to transfer the knowledge of small business management extension and skill in the form of training of various varieties of flavor chips, as well as durable kripik quality, PIRT license, trademark is expected to be a special food or superior product of village of OVOP-based community product business in relation to community economic empowerment through: (a) socialization and motivation of OVOP-based product business mapping, (b) counseling and training on the quality of economic empowerment of villagers; (c) training of citizens' business products with economic empowerment of villagers. Economic empowerment based on OVOP approach is in line with One Village One Village Excellence Product Policy from East Java Provincial Government through Community and Village Empowerment Office in the application, development and utilization of appropriate technology. In line with the Strategic Plan of Universitas Merdeka Madiun. The method of implementation in this program is counseling, instagram production skills training to market the product, and mentoring of production and marketing activities. With the realization of entrepreneurship training and understanding of social problems is expected to create jobs can make social changes, especially the field of welfare and education.*

*Key Word : Empowerment, Economics, OVOP (one village one product).*

**Abstrak.** Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karanggupito dan Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Aspek produksi aneka keripik dihasilkan perlu peningkatan kualitas, terasa tebal, kurang renyah, bumbu kurang terasa, label kusam kurang menarik, produk dihasilkan bukan makanan tahan lama. Perlu *transfer knowledge* penyuluhan manajemen usaha kecil dan pemberian *skill* berupa pelatihan pengolahan aneka kripik varian rasa, serta kualitas kripik tahan lama, ijin PIRT, merek dagang diharapkan akan menjadi makanan khas atau produk unggulan desa produk usaha warga berbasis OVOP dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui: (a) sosialisasi dan motivasi pemetaan produk usaha warga desa berbasis OVOP, (b) penyuluhan dan pelatihan kualitas pemberdayaan ekonomi warga desa, (c) pelatihan produk usaha warga dalam dengan pemberdayaan ekonomi warga desa. Pemberdayaan ekonomi berbasis pendekatan OVOP sejalan dengan Kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Sejalan dengan Renstra Universitas Merdeka Madiun. Metode pelaksanaan dalam program ini adalah penyuluhan, pelatihan ketrampilan pembuatan instagram untuk memasarkan produk, dan pendampingan aktivitas produksi dan pemasaran. Dengan terwujudnya pelatihan kewirausahaan dan pemahaman terhadap permasalahan sosial diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dapat melakukan perubahan sosial terutama bidang kesejahteraan dan pendidikan.

**Key Word :** Pemberdayaan, Ekonomi, OVOP (*one village one product*).

## PENDAHULUAN

### a. Analisis Situasi

Kondisi terkini mitra Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karanggupito dan Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal Kabupatean Ngawi Provinsi Jawa Timur. Permasalahannya, aspek produksi perlu peningkatan kualitas, terasa tebal dan kurang renyah, bumbu kurang terasa dan label kusam kurang menarik dan produk bukan makanan tahan lama. Untuk menjamin kontinuitas produktivitas usaha diperlukan aktivitas pendampingan serta solusi aspek pemasaran berupa pembuatan blog, facebook dan instagram maupun sertifikat PIRT untuk ijin edar dan untuk menjamin keamanan produk. Dari aspek manajemen, perhitungan rugi laba secara tertulis, pemasaran produk belum optimal, label produk keripik kurang menarik, dan belum ada ijin edar atau sertifikat PIRT.

Permasalahan biasanya masyarakat hanya membuat aneka keripik misalnya pisang, ketela pohon, ubi jalar, kentang, bothe, bonggol pisang) untuk dijual di sekitar areal desa atau pasar desa yang durasi perputaran pasar hanya 2 sampai 3 jam saja. dampaknya aneka keripik dihasilkan hanya dibungkus plastik tipis tanpa merk serta tanpa rasa atau rasa orisinal aja. Sehingga secara ekonomi baik rasa, kualitas serta tampilan kurang menarik untuk dijual. Hal ini mengakibatkan kualitas aneka keripik yang dihasilkan kadang tidak bertahan lama, muncul rasa tengik yang diakibatkan dari kualitas minyak yang digunakan serta kurang fres (mlemplem).

Gerakan OVOP (*One Village One Product*) pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan "*one village one product*" (satu wilayah satu produk), menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mendorong dan menumbuhkan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi berbasis pendekatan OVOP sejalan dengan Kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi dalam penerapan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. OVOP sebagai suatu pendekatan dalam menggerakkan ekonomi suatu wilayah melalui pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal. Produk unggulan merupakan ciri kekhasan suatu daerah dengan keunikan budaya dan tradisinya dapat menjadi daya tarik tersendiri memungkinkan untuk menjangkau aspek pemasaran yang luas. Melalui pembinaan secara intensif dari

pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dengan kemasan baru, sehingga memiliki daya saing tinggi secara goblal. Dengan berkembangnya produk khas suatu wilayah tersebut. "Misi program dikembangkan dengan berlandaskan kepada tiga filosofi yaitu: (1) merupakan produk lokal yang mengglobal, (2) menghasilkan produk atas kreativitas dan dengan kemampuan sendiri, serta (3) sekaligus mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia (M Arief: 2014). Bahwa kondisi sebelum kelompok UMKM OVOP menggunakan tehnologi usang (ketinggalan) dan tidak efisien, sehingga produk UMKM dihasilkan kurang mampu bersaing, pelanggan menyukai dan memilih produk memiliki label sertifikat seperti SNI, BPOM dan MUI, dan sementara semua produk UMKM tidak memiliki sertifikat PIRT, akses modal usaha terbatas, UMKM memperoleh modal usaha dari pinjaman perbankan, ketersediaan

pasar relatif terbatas, tidak ada jaringan untuk memasarkan produk dihasilkan.

### b. Permasalahan Mitra

Keterbatasan dihadapi masyarakat membangun usaha aneka keripik di mitra Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karanggupito dan Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal rentan dan tidak dapat bertahan lama, karena tidak memilik ketrampilan dan keahlian mengolah keripik yang dapat dijual dalam durasi waktu lama (tingkat ketahanan makanan), rasa, serta kualitas rendah sehingga adanya pembatasan dalam jumlah penjualan dan produksi. Keterbatasan-keterbatasan tersebut ditambah dengan relatif terhambatnya transportasi, yang menyebabkan jangkauan daerah pemasaran menjadi terbatas. Hambatan lain adalah lemahnya aspek kelembagaan, sehingga sulit dilakukan pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan komprehensif. Implikasinya adalah lemahnya akses informasi, teknologi, permodalan, dan hukum (izin merk dagang). Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam usaha aneka keripik meningkatkan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta tidak maksimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada.

Dilakukan pengabdian dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kendal kabupaten Ngawi. Setelah kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi OVOP (*One Village One Product*)

melalui program tersebut usaha ekonomi masyarakat desa yang merupakan usaha rumahan (*home industri*), dapat membangun mobilitas ekonomi masyarakat pedesaan, menumbuhkan perekonomian masyarakat desa serta dalam rangka membangun ekonomi pedesaan melalui konsep pemberdayaan masyarakat ekonomi pedesaan.

Kajian pendahulu yang sudah dilaksanakan oleh Muhammad Arief, 2014, dengan judul: *Implementasi Program One Village One Product dalam peningkatan Perekonomian Lokal* (Studi Pada Koperasi Agawe Makmur Di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen). Hasil penelitian menunjukkan Dinas Koperindag dan UMKM bekerja sama dengan pihak kedua yakni BDS (*Business Development Services*) Mekar Niaga Indonesia dan PT GenTrade (Sragen Trading) untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengelola koperasi. Pada akhirnya program OVOP yang diimplementasikan pada koperasi agawe makmur tidak maksimal dan berakibat pada koperasi agawe makmur berhenti berproduksi.

Sedangkan Sri Hermuningsih dan Dewi Kusuma Wardani, 2016, dengan judul: Pendekatan OVOP (*one village one product*) sebagai program pengembangan dan kebijakan IKM dan UMKM dengan keunggulan Daerah, dengan SIMPULAN DAN SARAN: (1). Sampai dengan tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM RI memperluas produk unggulan OVOP bahkan lebih satu produk di 100 titik di 33 provinsi berbasis peningkatan mutu dan daya saing agar produk unggulan itu bernilai tambah melalui industri pengolahan/prosesing (*value chain*), pengepakan, perluasan jaringan pemasaran secara integrasi dan lain- lain hingga tahun 2014. (2). Produk unggulan lokal menjadi tuan di negeri sendiri tetapi agar bisa mendunia, harus dipacu berbasis mutu dan daya saing. Hal ini bisa melalui proses industri pengolahan/ procesing (*value chain*) di dekat wilayah basis usaha seperti produk unggulan agro-industri pertanian, perkebunan, atau produk unggulan lainnya seperti objek pariwisata dengan agro-wisata, pagelaran budaya/peradaban dan kerajinan berbasis budaya tradisional melalui pendekatan OVOP. (3). Kegiatan pembinaan dilaksanakan secara lebih prioritas dan terfokus pada wilayah tertentu dan pasar tertentu sehingga hasil yang dicapai dari pembinaan tersebut terukur, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta sesuai selera dan standat pasar (*marketable*) atau *buyer*.

Dari kajian diatas, masih bersifat

identifikasi kelebihan dan kelemahan dari pendekatan OVOP dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait dengan pendekatan OVOP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar dapat menjadi model yang efektif dalam peningkatan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan sosial.

Berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP), bidang kajian harmoni sosial merupakan salah satu program unggulan penelitian Universitas Merdeka Madiun, sebagai perwujudan kepedulian Universitas Merdeka Madiun terhadap pembangunan dan upaya ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta implementasi melalui pengabdian pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk menghasilkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pendekatan OVOP (*one village one product*).

Sementara, program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, belum dapat menstimulasi inisiatif, kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal sebagai unit kegiatan usaha mandiri masyarakat pedesaan. Berdasarkan Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan pemerintah, adalah pembangunan masyarakat yang diorientasikan pada upaya peningkatan kemampuan masyarakat, agar masyarakat memiliki kemampuan daya saing serta mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan- persoalan sosial yang terjadi.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable. People centered*, dimana pemberdayaan masyarakat harus berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam mendayagunakan potensinya untuk memanfaatkan potensi yang ada guna mendukung aktifitas sosialnya. *Participatory*, pemberdayaan lebih menekankan pada usaha memberikan ruang dan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyusunan program pembangunan.

Sementara banyak program pembangunan yang lebih dominan nuansa kepentingan elit dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, akibatnya program pembangunan kurang mendapatkan dukungan masyarakat, karena kurang menyentuh esensi dari kebutuhan masyarakat pada umumnya. Melalui kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi diharapkan bahwa program pembangunan yang akan dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. *Empowering*, sifat pemberdayaan harus ditekankan pada upaya pendayagunaan sumber daya masyarakat melalui berbagai pelatihan-pelatihan untuk mentransformasi pengetahuan dan teknologi tepat guna menunjang penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Sedangkan *sustainable*, dimaksudkan memberikan perlindungan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dapat memperkuat basis pengembangan usaha masyarakat. Menurut Sumardjo (1999) dalam Sri H dan Dewi K menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya (Ahmad siddiq: 2012).

Pemberdayaan masyarakat dapat dinilai berhasil apabila, masyarakat memiliki kemampuan memahami potensi diri, serta memiliki kemampuan menyusun rencana-rencana kegiatan dalam mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Persoalan kemiskinan sosial, salah satu disebabkan karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat kurang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia dilingkungan sekitarnya. Setiap individu tentu memiliki kemampuan tertentu, hanya saja kemampuan yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal dalam menangkap peluang yang ada. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan kepada usaha untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat pedesaan khususnya agar dapat termotivasi untuk mendayagunakan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan menangkap peluang yang ada.

Strategi pemberdayaan masyarakat selama ini, belum dapat menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan dalam mendorong peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan, berbagai pembinaan dan pelatihan yang dijalankan melalui program pemerintah desa belum mampu mendorong masyarakat untuk mendayagunakan kemampuannya dalam mendukung usaha secara mandiri. Pendekatan OVOP (*One Village One Product*), yang menjadi gagasan dan sekaligus diperkenalkan oleh Morihiko Hiramatsu, seorang mantan pejabat MITI yang terpilih menjadi Gubernur Oita pada tahun

1979. Pada masa jabatannya diorientasikan untuk mengentaskan kemiskinan warganya melalui penerapan pembangunan wilayah dengan basis pada pengembangan potensi lokal untuk mendorong nilai tambah agar memiliki kemampuan daya saing dengan produk-produk lain di perkotaan. Melalui pemberdayaan ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk lebih berkeaktifitas dalam memanfaatkan potensi yang ada. Pendekatan ini telah menginspirasi pemerintah dalam mengimplementasikan pendekatan OVOP di Indonesia tepatnya dimulai pada tahun 2008, yang bertujuan untuk mengembangkan produk industri kecil dan menengah agar memiliki kemampuan daya saing secara global. Dengan peningkatan usaha kecil dan menengah tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah usahanya dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Basis utama pendekatan OVOP adalah pengembangan produk lokal di suatu wilayah, khusus di pedesaan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan mobilitas usaha masyarakat desa dan sekaligus memberikan dampak pada perkembangan ekonomi pedesaan. Sasaran program OVOP, adalah sebagai berikut.

- a. Kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.
- b. Membangun *sustainability* (kesinambungan) berbagai aktivitas di pedesaan/daerah, yang antara lain dapat dilaksanakan melalui manajemen rantai suplai (*supply-chain management*), penempatan kelembagaan koperasi dan peningkatan infrastruktur.
- c. Menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
- d. Meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) terhadap pasar untuk para pelaku usaha.

Sasaran utama program OVOP adalah memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang berada di pedesaan/daerah. Pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran sudah menjadikan tekad pemerintah untuk menstabilkan perekonomian nasional serta memberikan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan lebih aktif dalam era globalisasi.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Diharapkan oleh para mitra adalah terselenggaranya kegiatan produktif yang memberikan manfaat secara sosial dan ekonomis dalam menggerakkan ekonomi suatu

wilayah melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis potensi lokal. Produk unggulan dari Kecamatan Kendal merupakan ciri kekhasan daerah Kabupaten Ngawi dengan keunikan budaya dan tradisi dapat menjadi daya tarik, menjangkau aspek pemasaran luas, peningkatan kualitas produk, kemasan baru, sehingga memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu menopang perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta sekaligus dapat mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, mencakup metode-metode sebagai berikut:

1. Penyuluhan : (Penyuluhan sumber gagasan bagi produk baru, Proses perencanaan dan pengembangan produk, Kewirausahaan dan Kiat sukses berwirausaha, Manajemen usaha, yang mencakup: Manajemen keuangan (perhitungan harga pokok produksi dan penentuan harga jual), Manajemen pemasaran, Pelatihan ketrampilan : Membuat dan mengolah aneka keripik (baik jenis maupun rasa), Kualitas aneka keripik yang enak, renyah dan tahan lama, Pengemasan produk aneka keripik sesuai dengan standar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dan mengurus Ijin memproduksi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, membantu Hak Kekayaan Intelektuan (merek dagang) bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi, Pemberian merek aneka keripik, Desain merek aneka keripik, Pendaftaran merek dagang aneka keripik).
2. Pembuatan akun Instagram, Facebook

memasarkan produk aneka keripik dihasilkan produk unggulan desa. Pembuatan akun instagram, facebook akan dibantu oleh para mahasiswa.

3. Pendampingan aktivitas produksi dan pemasaran. (Pendampingan aspek produksi, aspek pemasaran produk dan manajemen usaha. Dari aspek pemasaran, mitra akan didampingi mencari akses pasar, melalui media online (*facebook* dan *instagram* yang dibuat oleh mahasiswa), melalui koperasi mahasiswa dan serta bekerja sama dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro di Kabupaten Ngawi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manfaat yang sudah direalisasikan dengan mengadakan penyuluhan tujuan mengubah perilaku masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Melalui penyuluhan sumber gagasan produk baru untuk masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian dan Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar, Proses perencanaan dan pengembangan produk dengan melalui pelatihan usaha pelatihan produk yang sumber bahan bakunya ada di Desa Karangrejo, dan Desa Karanggupito, kewirausahaan dan berwirausaha dari perencanaan dan persiapan bahan, pengolahan, proses produksi hingga pengemasan, manajemen usaha : manajemen keuangan (perhitungan harga pokok produksi dan penentuan harga jual), manajemen pemasaran.

Hasil dari pelatihan dan pendampingan bagi kedua Mitra : pelatihan ketrampilan : Membuat dan mengolah aneka keripik (baik jenis maupun rasa) : (a) Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karanggupito : membuat dan mengolah Keripik Pisang, Kripik Jamur, Keripik Pongge Durian, Keripik Tempe sedangkan (b) Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo : membuat dan mengolah Keripik Enthik (bothe), Keripik Ketela Rasa Gadung, Keripik Bentoel, Keripik Pegagan. Teknik persiapan, pemilihan bahan baku serta pengolahan yang baik dan benar sehingga kualitas keripik yang dihasilkan enak dan tahan lama. Pengemasan produk aneka keripik sesuai dengan standar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi. Mengurus Ijin memproduksi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Membantu Hak Kekayaan Intelektuan

(merek dagang) bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi dalam Pendaftaran merek dagang aneka

keripik. Pembuatan akun Instagram, Facebook untuk memasarkan produk aneka keripik yang dihasilkan sebagai produk unggulan desa.



Gambar1. Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karanggupito



Gambar 2. Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo

Manfaat Yang diperoleh setelah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis

ekonomi OVOP (*One Village One Product*) melalui program tersebut usaha ekonomi

mengubah perilaku masyarakat khususnya Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karangputo dan Kelompok Usaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan dibidang produksi atau pengolahan, pemasaran, merek serta ijin PIRT.

#### SIMPULAN DAN SARAN DAN SARAN

Sejalan dengan Kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Dan sejalan dengan Renstra Universitas Merdeka Madiun, Kabupaten Ngawi sebagai bagian institusi menjadi wilayah pengabdian Universitas Merdeka Madiun, memiliki tanggung jawab secara moral dan akademis dalam upaya untuk mendorong kemajuan desa- desa tersebut melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pendekatan OVOP (*one village one product*), dalam program ini adalah penyuluhan, pelatihan ketrampilan pembuatan instagram untuk memasarkan produk, dan pendampingan aktivitas produksi dan pemasaran. Dengan terwujudnya pelatihan kewirausahaan dan pemahaman terhadap permasalahan sosial diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dapat melakukan perubahan sosial terutama bidang kesejahteraan dan pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad siddiq, 2012 *info-pendampingan.blogspot.com/.../pengertian-dan-t...diakses tanggal. 17 Pebruari 2017.*
- Joseph Ndua Ngungi dan Prof.Henry Bwisa (2013),“Factors Influencing Growth of Group OwneSmall and Medium Enterprises:a case of one village one product enterprises”,*administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/651*, diakses tanggal. 14 Pebruari 2017.
- Muhammad Arief, 2014, dengan judul: *Implementasi Program On Village One Product dalam peningkatan Perekonomian Lokal (Studi Pada KoperasiAgawe Makmu Di Desa Sambirembe,Kecamat Kalijambe, Kabupaten Sragen)* *administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/.../651*, diakses

tanggal. 14 Pebruari2017.

Sri Hermuningsih dan Dewi Kusuma Wardani, 2016, dengan judul: Pendekatan OVOP (*one village one product*) sebagai program pengembangan dan kebijakan IKM dan UMKM dengan keunggulan Daerah, *journal.ustjogja.ac.id/.../pendekatan-ovop-one-village-one-product-seba....*,diakses tanggal. 14 Pebruari 2017. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat